



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 8 Juli 2020
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan Pemerintah terhadap ketahanan struktur ketenagakerjaan pada Pandemi Covid-19.2. Langkah strategis Pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada Tahun 2021 pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).3. Penjelasan mengenai <i>grand design</i> Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) berdasarkan PP No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dengan Program Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi pekerja sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar, Lc./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Peserta Rapat : A. 39 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
Hadir dan Virtual B. Menteri Ketenagakerjaan RI: Dra. Hj. Ida Fauziah, M.Si.,
beserta jajaran;
C. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan : Agus Susanto,
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 10.20 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempersiapkan tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan menyusun kebijakan dalam mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, pemagangan, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan BLK pemerintah dan swasta.
2. Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja.
3. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid 19 melalui program kartu prakerja dan program-program pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengambil kebijakan dalam perlindungan pekerja antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan PHK dan merumahkan, serta meminta pengusaha tetap memberikan hak normatif pekerja sebagaimana ketentuan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - b. Melakukan koordinasi lintas instansi, terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja.
 - c. Membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM.
 - d. Mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid 19 di lingkungan kerja dan melaksanakan perlindungan pengupahan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk membebaskan pajak pengambilan dana JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
6. Komisi IX DPR mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan terobosan kemudahan dalam memperoleh bantuan pembiayaan perumahan bagi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan.

7. Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang belum di jawab.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Jakarta, 8 Juli 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

H. ANSORY SIREGAR, Lc.
A-414